

**PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG INTERNASIONAL ATAS
KEBIJAKAN *REPORT PALM OIL* OLEH UNI EROPA TERHADAP
INDONESIA DITINJAU DARI *WORLD TRADE ORGANIZATION***

Oleh:

Luh Intan Purnama Dewi, NIM. 1814101081

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan CPO dalam ketentuan WTO, serta untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan *report palm oil* menurut ketentuan WTO. Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang pengaturan CPO termasuk implementasi prinsip MFN dalam WTO dan menganalisis proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai kebijakan pemboikotan minyak kelapa sawit. Digunakan pula jenis pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang mana data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Melalui metode penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa terhadap Indonesia atas pemboikotan CPO telah dibantah pemerintah Indonesia melalui sertifikasi berupa RSPO, ISCC, SAN dan ISPO. Sertifikasi tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip non-diskriminasi (MFN). Dalam praktiknya di lapangan, penerapan prinsip MFN dalam perdagangan internasional sering kali tidak dapat berjalan dengan mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus pemboikotan CPO oleh Uni Eropa terhadap Indonesia, yang mana RED II dianggap melanggar prinsip MFN termasuk mendiskriminasi CPO Indonesia dari minyak nabati lainnya. Penyelesaian sengketa di WTO dapat diselesaikan melalui lembaga DSB. Terkait sengketa pemboikotan CPO yang dilakukan Uni Eropa, Indonesia dapat melakukan beberapa upaya yaitu dengan tindakan yang sifatnya *power based*, tindakan yang sifatnya *right based*, serta tindakan yang sifatnya *interest based*.

KATA KUNCI: Prinsip *Most Favoured Nation*, Penyelesaian Sengketa Dagang, CPO

**SETTLEMENT OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES ON THE
POLICY OF REPORT PALM OIL BY THE EUROPEAN UNION TOWARDS
INDONESIA IN TERMS OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION**

By:

Luh Intan Purnama Dewi, NIM.1814101081

Law Department

ABSTRACT

The purposes of this research are to discover and analyze the CPO regulation in WTO provisions, as well as to discover and analyze the dispute settlement process between Indonesia and the European Union regarding the policy of reporting palm oil according to WTO provisions. In order to answer the research problems, normative legal research was used to examine the regulation of CPO including the implementation of MFN principles in the WTO, and to analyze the dispute resolution process between Indonesia and the European Union regarding the policy of palm oil boycotting. This research also used of statutory, conceptual, and case approach which all of data are collected by document study technique and analyzed used a qualitative descriptive technique. Through this research method, it is found that the policies issued by the European Union against Indonesia regarding the CPO boycott have been denied by the Indonesian government through certification in the form of RSPO, ISCC, SAN, and ISPO. The certification must be carried out with the principle of non-discrimination (MFN). In the field practice, the application of MFN principles in international trade is often not run well. It can be seen from the case of the CPO boycott by the European Union against Indonesia, when RED II is considered to violate MFN principles, including discriminating Indonesian CPO from other vegetable oils. Dispute resolution in the WTO can be resolved through the DSB institution. Regarding the dispute over the CPO boycott by the European Union, Indonesia can carry out several efforts, namely by taking power-based actions, rights-based actions, and interest-based actions.

KEYWORDS: *Most Favoured Nation Principles, Trade Disputes Settlement, CPO*